

KONSEP LANDASAN PENDIDIKAN BERDASARKAN UUD 1945: Analisis Arah dan Prinsip Pendidikan dalam Perspektif Konstitusional

Sugeng Riyadi¹, Dadeng Irman Fauzi², Sugino³, Dede Indra Setiabudi⁴
Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia
email :oziemoodzaki@gmail.com

Abstract:

In this research, we will explore how the basic concepts of education are regulated in the 1945 Constitution, seeking an in-depth understanding of the values, principles and goals of education contained in the state constitution. This is relevant considering that education is considered to be one of the key instruments for achieving national ideals and objectives as stated in the Preamble to the 1945 Constitution. For research methods, the descriptive qualitative approach is a type of qualitative research. The method used in writing this journal is a descriptive qualitative analysis method of case studies based on literature review. Analysis studies are intensive testing, using multiple sources of both qualitative evidence. In this case, we also use comparative studies of previous research results as well as articles in the mass media related to the discussion. From the data obtained, it is then arranged based on rules and analysis in accordance with the rules of writing, making it easier to discuss existing problems. Results related to the Basic Concept of Education - From the analysis of articles relating to education in the 1945 Constitution, it can be concluded that the basic concept education in Indonesia includes the values of democracy, justice, equality, character development, and state responsibility in providing education. From the analysis of articles relating to education in the 1945 Constitution, it can be concluded that the basic concept of education in Indonesia includes the values of democracy, justice, equality, character development and state responsibility in providing education. in implementing the basic concept of education. For example, there are educational disparities between regions, varying quality of education, and financial constraints that can affect the government's efforts to realize national education goals. It is necessary to pay attention to the extent to which the implementation of education policies is in accordance with the basic concepts contained in the 1945 Constitution.

Keywords: Basic Concept of Education, 1945 Constitution.

Abstrak :

Dalam penelitian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep landasan pendidikan diatur dalam UUD 1945, mencari pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai, prinsip, dan tujuan pendidikan yang terkandung dalam konstitusi negara. Hal ini menjadi relevan mengingat pendidikan dianggap sebagai salah satu instrumen kunci untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk metode penelitian, pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif studi kasus berdasarkan kajian kepustakaan. Studi analisis adalah pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti baik kualitatif. Dalam hal ini juga menggunakan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media massa yang terkait dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada. Hasil terkait Konsep Landasan Pendidikan - Dari analisis pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan dalam UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa konsep landasan pendidikan di Indonesia mencakup nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, pengembangan karakter, dan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari analisis pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan dalam UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa konsep landasan pendidikan di Indonesia mencakup nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, pengembangan karakter, dan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pendidikan. dalam implementasi konsep landasan pendidikan. Misalnya, adanya kesenjangan pendidikan antar wilayah, kualitas pendidikan yang bervariasi, dan kendala finansial yang dapat mempengaruhi upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Perlu diperhatikan sejauh mana implementasi kebijakan pendidikan sesuai dengan konsep landasan yang tertuang dalam UUD 1945.

Kata Kunci : Konsep Landasan Pendidikan, UUD 1945

Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan sentral dalam membangun karakter, kecerdasan, dan kemampuan individu serta merupakan pilar terpenting pembangunan nasional. Sebagai negara yang berdasarkan undang-undang UUD 1945, Indonesia menyadari pentingnya pendidikan sebagai landasan utama pembangunan dan kemajuan negara. Konsep landasan pendidikan dalam konteks UUD 1945 merupakan suatu hal yang

penting untuk dikaji dan dipahami, karena UUD 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan nasional, termasuk pendidikan.

Kajian ini berupaya memahami secara mendalam nilai, prinsip, dan tujuan pendidikan yang terkandung dalam konstitusi negara serta mengkaji bagaimana konsep dasar pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini wajar mengingat pendidikan dianggap sebagai salah satu sarana penting dalam mencapai cita-cita dan tujuan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Penting untuk dipahami bahwa landasan pendidikan berkaitan dengan aspek normatif dan filosofis yang membentuk pembentukan lembaga nasional.

Dalam penelitian ini akan menganalisis ketentuan-ketentuan UUD 1945 terkait pendidikan dan mengkaji secara detail pemikiran para Founding Fathers yang mendukung berdirinya korporasi sekolah ini. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana UUD 1945 memberikan landasan filosofis, normatif, dan konstitusional bagi sistem pendidikan Indonesia.

Hal ini akan memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang mendukung pembangunan karakter, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing sejalan dengan cita-cita nasional yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini perlu dilakukan.

Metodologi Penelitian

Untuk metode penelitian, pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif studi kasus berdasarkan kajian kepustakaan. Studi analisis adalah pengujian intensif, menggunakan berbagai sumber bukti baik kualitatif. Dalam hal ini juga menggunakan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada.

Dengan metode ini, penulis ingin mengkaji bagaimana konsep landasan pendidikan berdasarkan UUD 1945. Diharapkan hasil yang diperoleh dalam studi ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang membangun dan bermanfaat, baik

itu kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan Negara. Jenis data yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian terdahulu. Dan metode analisis data yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif Data-data yang diperoleh dari tinjauan literatur maupun website terkait disusun menjadi sebuah fakta-fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan solusi.

Hasil dan Pembahasan

Landasan Konstitusional Pendidikan

Kita akan membahas ketentuan UUD 1945 yang khusus mengatur aspek pendidikan. Menyoroti ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan hukum pendidikan di Indonesia.

Arah Pendidikan dalam UUD 1945

- Analisis arah pendidikan Indonesia berdasarkan UUD 1945: Pembukaan UUD 1945 sebagai pedoman nilai-nilai pendidikan. Pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai inti seperti keadilan sosial, persatuan, kesejahteraan, dan martabat kemanusiaan. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral yang harus tercermin dalam sistem pendidikan. Menganalisis praktik nilai-nilai tersebut memberikan gambaran tentang orientasi moral dan etika pendidikan di Indonesia.
- Pasal 31 dan 32 tentang hak atas pendidikan dan kewajiban negara: Pasal 31 dan 32 UUD 1945 menetapkan hak setiap warga negara atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menyelenggarakannya. Menganalisis implementasi hak atas pendidikan memberikan informasi mengenai sejauh mana akses dan kesetaraan dalam pendidikan telah dicapai. Selain itu, mandat pendidikan negara merupakan indikator efektivitas kebijakan pendidikan.
- Pasal 33(2) tentang kedudukan perguruan tinggi Pasal 33(2) menjadi dasar hukum kedudukan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bebas dan bertanggung jawab.
- Dengan menganalisis peran pendidikan tinggi dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, kita dapat memperoleh gambaran mengenai arah pendidikan tinggi di Indonesia.

- Pasal 34 tentang Ketenagakerjaan dan Pengangguran Pasal 34 UUD 1945 memberikan landasan bagi penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan pengangguran. Dalam konteks ini, analisis terhadap keberhasilan sistem pendidikan dalam mempersiapkan lulusan memasuki dunia kerja menjadi penting. Selain itu, keberlanjutan dan relevansi kurikulum juga merupakan bagian penting dari analisis ini.
- Pasal 35 (4) tentang pendidikan budaya dan karakter bangsa: Pasal 35 (4) menekankan pentingnya pendidikan budaya dan pendidikan karakter bangsa. Menganalisis pelaksanaan pendidikan karakter, pemahaman nilai-nilai budaya dan pembentukan jati diri bangsa melalui pendidikan dapat menunjukkan arah pendidikan dalam membangun masyarakat yang berkarakter dan berakhlak mulia. Analisis menyeluruh terhadap ketentuan-ketentuan UUD 1945 terkait pendidikan akan membantu kita lebih memahami arah pendidikan di Indonesia.
- Sejauh mana nilai, hak, tugas, dan tujuan yang tertuang dalam konstitusi diwujudkan dalam praktik pendidikan akan memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan sistem pendidikan Indonesia dan sejauh mana arah pendidikan sejalan dengan visi nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Prinsip-prinsip Pendidikan dalam UUD 1945

Prinsip-prinsip Pendidikan Indonesia dalam UUD 1945 tertuang sebagai berikut :

- Keadilan dan Kesetaraan Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan.
- Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan menekankan bahwa hak ini harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi, baik secara sosial, ekonomi maupun geografis.
- Pembangunan karakter dan martabat bangsa Pasal 31(3) dan 35(4) UUD 1945 menunjukkan pentingnya pendidikan dalam pengembangan karakter dan martabat bangsa.
- Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan harus mencakup pembentukan karakter moral, etika, dan nilai-nilai budaya yang melekat pada jati diri bangsa.
- Demokrasi dan Keterbukaan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan karakter demokratis.

- Prinsip demokrasi dalam pendidikan menekankan keterbukaan, partisipasi, dan pluralisme sebagai landasan dalam proses pembelajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan.
- Otonomi Universitas Pasal 33(2) UUD 1945 mengatur prinsip otonomi bagi perguruan tinggi.
- Hal ini menegaskan bahwa universitas mengambil posisi yang bebas dan bertanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- Kewajiban Negara dalam penyelenggaraan pendidikan Pasal 31(1) dan 31(3) UUD 1945 mengatur kewajiban Negara dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Prinsip ini menekankan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan akses yang memadai terhadap pendidikan dan fasilitas kepada seluruh warga negara.
- Pendidikan sebagai Investasi Pembangunan Pasal 31(2) UUD 1945 menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.
- Prinsip ini menyatakan bahwa pendidikan dipandang sebagai investasi strategis dalam pembangunan, dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan nasional.
- Pendidikan sebagai hak asasi manusia: Hak atas pendidikan diakui sebagai hak asasi manusia berdasarkan Pasal 31 UUD 1945.
- Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan bukan sekedar kebijakan, namun merupakan hak dasar setiap individu yang harus dihormati dan dijamin oleh negara. Prinsip pendidikan UUD 1945 mencerminkan visi dan nilai-nilai yang diperlukan dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat Indonesia.
- Analisis rinci mengenai penerapan prinsip-prinsip ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebijakan pendidikan dan perannya dalam mencapai tujuan nasional yang ditetapkan dalam konstitusi.

Implementasi Konsep Landasan Pendidikan :

Implementasi Konsep Landasan Pendidikan Berdasarkan UUD 1945, dituangkan menjadi berikut :

- Akses dan Kesetaraan Pendidikan
 - Mendorong akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dengan menjamin kesetaraan dalam kesempatan belajar. Program beasiswa, bantuan pendidikan, dan pengurangan disparitas pendidikan antar

wilayah diwujudkan untuk mencapai prinsip kesetaraan dalam UUD 1945.

- Pengembangan Karakter dan Kepribadian Bangsa
Integrasi nilai-nilai budaya, moral, dan karakter dalam kurikulum pendidikan. Pembelajaran dilakukan melalui metode yang mendorong perkembangan kepribadian yang kuat dan berakhlak mulia, serta memperkenalkan siswa pada warisan budaya dan sejarah nasional.
- Demokrasi dan Keterbukaan dalam Pendidikan
 - Memastikan partisipasi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Mendorong keterbukaan dalam penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum.
- Otonomi Perguruan Tinggi
 - Memberikan kebebasan pada perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum, penelitian, dan inovasi. Penyelenggaraan kegiatan akademik dan pengelolaan internal perguruan tinggi disesuaikan dengan prinsip otonomi, memungkinkan kemajuan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Kewajiban Negara dalam Menyelenggarakan Pendidikan
 - Pengalokasian anggaran pendidikan yang memadai, pembangunan infrastruktur pendidikan, dan pelatihan guru. Memastikan bahwa negara melaksanakan perannya dalam menyediakan fasilitas, tenaga pendidik yang berkualitas, dan sumber daya pendidikan yang memadai.
- Pendidikan sebagai Investasi Pembangunan
 - Fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan. Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, pelatihan keterampilan, dan pembangunan SDM yang berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia
 - Memastikan bahwa hak atas pendidikan diakui dan dihormati, tanpa diskriminasi. Penyediaan akses pendidikan untuk kelompok rentan dan pemberdayaan mereka melalui program-program pendidikan inklusif.
- Implementasi konsep landasan pendidikan berdasarkan UUD 1945 perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa prinsip-

prinsip tersebut tidak hanya tertulis dalam konstitusi, tetapi juga terealisasi dalam kebijakan, program, dan praktik pendidikan sehari-hari. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan pendidikan sesuai dengan cita-cita nasional yang terkandung dalam UUD 1945.

Kontribusi Terhadap Pendidikan Nasional

Kontribusi Terhadap Pendidikan Nasional Berdasarkan Konsep Landasan Pendidikan dalam UUD 1945:

- Meningkatkan akses dan kesetaraan dalam pendidikan .
- Mendorong penerapan kebijakan yang dapat meningkatkan akses dan kesetaraan dalam pendidikan di seluruh negeri. Program beasiswa, hibah studi, dan pengurangan kesenjangan regional membantu menjadikan pendidikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
- Pembentukan karakter dan jati diri bangsa Kami memberikan landasan pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademik tetapi juga pembentukan karakter dan jati diri bangsa.
- Kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal, moral, dan budaya nasional membantu menciptakan generasi yang memiliki rasa jati diri dan moralitas yang kuat.
- Penguatan sumber daya manusia Mendorong investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan.
- Dengan mendukung universitas independen, pemerintah dapat mendorong penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global.
- Memperkuat demokrasi dan partisipasi masyarakat Menyelenggarakan pendidikan sesuai prinsip demokrasi dan menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan.
- Melibatkan orang tua, siswa, dan masyarakat dalam tata kelola sekolah dan pengembangan kurikulum dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
- Peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi Membangun pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan ekonomi, dengan penekanan pada penguatan sumber daya manusia.

- Pendidikan dan kualifikasi yang disesuaikan dengan pasar tenaga kerja memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan daya saing perekonomian.
- Penerapan Hak Asasi Manusia Memperkuat prinsip bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin oleh Negara.
- Dengan menyediakan akses terhadap pendidikan bagi semua orang, termasuk kelompok yang kurang beruntung, negara ini secara aktif memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
- Pendidikan sebagai alat perubahan sosial Mendorong perubahan sosial melalui pendidikan yang mendidik dan memperkuat masyarakat.
- Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan keberagaman dapat menjadi kekuatan perubahan positif dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.
- Konsep dasar pendidikan dalam UUD 1945 memberikan sumbangan penting dalam menentukan arah pendidikan nasional di Indonesia.
- Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidikan harus menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- Hasil dan pertimbangan penelitian tentang konsep dasar pendidikan berdasarkan UUD 1945 adalah sebagai berikut.
- Konsep dasar pendidikan di Indonesia meliputi nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, pengembangan karakter, dan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Implementasi konsep dalam kebijakan pendidikan - Implementasi konsep dasar pendidikan tercermin dalam berbagai kebijakan pendidikan seperti program beasiswa untuk meningkatkan akses pendidikan, pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan pendidikan.
- Memperkuat otonomi institusi pendidikan tinggi untuk mendorong penelitian dan inovasi.
- Sumbangan Terhadap Pendidikan Nasional – Konsep dasar pendidikan dalam UUD 1945 memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan pendidikan nasional.

- Memperluas akses pendidikan, penguatan karakter bangsa, dan penguatan sumber daya manusia menjadi poin penting untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
- Pembahasan Konsistensi pelaksanaan dengan konsep dasar – Perlu diperhatikan sejauh mana pelaksanaan kebijakan pendidikan sejalan dengan konsep dasar UUD 1945.
- Bahkan ketika prinsip-prinsip ini diterapkan sebagai kebijakan, penting untuk menilai apakah ide-ide dasarnya benar-benar tercermin dalam praktik pendidikan sehari-hari.
- Tantangan implementasi - Pembahasan meliputi identifikasi tantangan penerapan konsep dasar pendidikan.
- Misalnya saja adanya kesenjangan pendidikan antardaerah, perbedaan kualitas pendidikan, dan kendala finansial yang dapat mempengaruhi upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
- Relevansi konsep dengan tantangan pendidikan saat ini: - Sejauh mana konsep dasar pendidikan UUD 1945 masih relevan untuk menjawab tantangan pendidikan saat ini seperti Revolusi Industri 4.0, globalisasi, dan perubahan sosial?
- Dalam diskusi kali ini, penelitian memberikan wawasan dalam mengadaptasi konsep-konsep mendasar untuk merespons perubahan zaman.
- Pembahasan temuan penelitian ini dapat menjadi landasan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan sesuai dengan visi nasional yang tertuang dalam UUD 1945.
- Seiring berjalannya waktu, penting untuk terus mengkaji dan mengevaluasi konsep dasar pendidikan untuk memastikan pendidikan di Indonesia tetap relevan dan memenuhi kebutuhan Zaman.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari analisis pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan dalam UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa konsep landasan pendidikan di Indonesia mencakup nilai-nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, pengembangan karakter, dan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pendidikan. dalam implementasi konsep landasan pendidikan. Misalnya, adanya kesenjangan pendidikan antar wilayah, kualitas

pendidikan yang bervariasi, dan kendala finansial yang dapat mempengaruhi upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Perlu diperhatikan sejauh mana implementasi kebijakan pendidikan sesuai dengan konsep landasan yang tertuang dalam UUD 1945. Meskipun prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kebijakan, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa konsep landasan benar-benar tercermin dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Saran

Berdasarkan kajian konsep dasar pendidikan dalam UUD 1945, berikut saran yang dapat diambil untuk memperkuat dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia :

1. Optimalkan akses terhadap pendidikan - Memperkuat dan meningkatkan program akses, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih sulit dijangkau, termasuk anak-anak di daerah terpencil, masyarakat miskin, dan berkebutuhan khusus.
2. Penguatan Karakter dan Akhlak – Memasukkan kajian karakter dan nilai moral ke dalam kurikulum. Kami mendukung inisiatif yang membantu membangun karakter positif dan nilai moral yang kuat di semua tingkat pendidikan.
3. Peningkatan mutu pendidikan tinggi - Fokus pada peningkatan mutu pendidikan tinggi dengan mendukung kebebasan akademik dan otonomi pendidikan tinggi.
4. Mendorong penelitian dan inovasi yang dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan - Meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain siswa, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan.
Hal ini dapat melibatkan partisipasi dalam perencanaan kurikulum, evaluasi sekolah, dan pemilihan kepala sekolah.
5. Ketersediaan Sumber Daya – Menjamin ketersediaan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, termasuk perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pendidikan.
Kami mendukung pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan guru.
6. Relevansi Kurikulum – Memperbarui dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman dan tuntutan pasar tenaga kerja.

Memastikan kurikulum mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai yang relevan dengan perkembangan masyarakat.

7. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi. Meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Hal ini memungkinkan kami mengukur efektivitas sistem dan kebijakan serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

8. Dukungan program beasiswa – Meningkatkan dukungan program beasiswa bagi siswa berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi.

Hal ini membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap pendidikan antar berbagai sektor masyarakat. Usulan-usulan tersebut dapat menjadi landasan penguatan dan perbaikan sektor pendidikan Indonesia sejalan dengan konsep dasar pendidikan dalam UUD 1945.

Implementasi proposal ini memerlukan kerja sama dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat lokal, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, S. R., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia di era awal kemerdekaan sampai orde lama. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 569-577.
- Akbal, M. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa. *Gajah Mada University Press Bekerjasama Dengan LAN RI*, 1(1), 485-493.
- Hakim, A. R. (2023). Konsep Landasan Dasar Pendidikan Karakter di Indonesia. *Journal on Education*, 6(1), 2361-2373.
- Jumyati, J., Nur'ariyani, S., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Landasan Yuridis Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 8296-8301. Merinci sumber-sumber utama dan literatur yang mendukung analisis dan argumentasi dalam jurnal.

- Muslim, A. (2023). Landasan Filsafat Idealisme dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 34-40.
- Putri, S. B., & Dewi, D. A. (2021). Reaktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Milenial. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3(2), 42-49.
- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34-41.
- Subijanto, S. (2010). Prinsip-Prinsip dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16(5), 532-549.
- Sujatmoko, E. (2010). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. *Jurnal konstitusi*, 7(1), 181-212.
- Triningsih, A. (2017). Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 332-350.